

ABSTRAK

Kerja sama antardaerah (KAD) merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan, mengatasi keterbatasan sumber daya, dan menangani permasalahan lintas wilayah. Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan menghadapi permasalahan serius berupa banjir yang hampir terjadi setiap tahun akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, dan pasang air laut. Fenomena banjir ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terganggunya aktivitas masyarakat, kerusakan infrastruktur, hingga penurunan kualitas kesehatan lingkungan. Kawasan perbatasan kedua daerah, terutama di sekitar aliran Sungai Brengi-Meduri, menjadi wilayah yang paling sering terdampak. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa banjir merupakan isu lintas batas administratif yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan kerja sama antardaerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola kerja sama daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan dalam penanggulangan masalah banjir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen. Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan hasil penelitian terhadap literatur atau teori yang ada. Fokus analisis mencakup identifikasi latar belakang kerja sama, model kerja sama, dan pola kerja sama antara Kabupaten dan Kota Pekalongan dalam penanggulangan masalah banjir. Model kerja sama dianalisis dari tiga perspektif utama, yaitu mekanisme pelayanan kerja sama, struktur kelembagaan, serta sektor atau dimensi kerja sama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sinergi antarpemerintah daerah terbentuk dan dijalankan dalam konteks penanggulangan banjir lintas wilayah. Pola kerja sama dianalisis dengan membagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kedudukan antarpihak yang terlibat dan keterlibatan pihak dalam pengelolaan kerja sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh dua faktor utama: (1) kesamaan kebutuhan untuk menangani masalah banjir lintas wilayah yang berdampak pada kedua daerah, dan (2) dorongan dari pihak eksternal seperti Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dewan Air Belanda, serta Mercy Corps Indonesia. Bentuk kerja sama yang terjalin meliputi kegiatan pelayanan, perencanaan, dan pengelolaan bersama yang dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun nonformal dengan karakter multisektoral. Pola kerja sama yang terbentuk termasuk dalam kategori Equal Kolaboratif dan Inter-Governmental Management (IGM), yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif, kesetaraan peran, dan koordinasi erat antarinstansi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring program. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai pola kerja sama antardaerah, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan efektivitas kolaborasi lintas wilayah untuk penanggulangan banjir yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kerja Sama Daerah, Latar Belakang Kerja Sama, Model Kerja Sama, Pola Kerja Sama